

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penelitian ini akan membahas tentang modalitas kemenangan Mariatul Kiftiah pada pemilihan umum legislatif di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada era reformasi. Pada era reformasi saat ini sistem Pemilu di Indonesia telah mengalami perubahan, dari sistem proposional tertutup (*close-list PR*) ke sistem proposional terbuka (*open-list PR*). Sistem proposional terbuka mulai berlaku pada pemilihan umum tahun 2004 sebagaimana telah diatur dalam pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.¹

Dalam sistem tersebut memberi peluang tidak hanya ke setiap calon yang baru pertama kali mencalonkan diri tetapi juga memberi peluang orang lama untuk menang juga. Faktor lain yang mendorong maraknya persaingan partai politik adalah besarnya animo masyarakat untuk berperan dalam organisasi partai politik. Pada era reformasi, para tokoh-tokoh yang mengakar di masyarakat dan para cendekiawan berbondong-bondong mendirikan atau memasuki partai politik.

¹ Khairul Fahmi, “*Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 9

Selain persaingan antarpartai, sistem Pemilu yang proposional terbuka juga memperketat persaingan dalam merebut kursi parlemen. Menurut Ali Masykur Musa dalam Khairul Fahmi, sistem ini diharapkan akan menghasilkan keseimbangan otoritas partai sebagai kontestan Pemilu dengan kedaulatan rakyat yang diberikan kebebasan memilih. Rakyat tidak hanya memilih nama calon legislatif yang diusulkan partai politik. Rakyat memilih nama calon legislatif sekalipun dari daftar calon yang diajukan oleh partai.²

Selain sistem proposional terbuka yang dapat mempengaruhi perolehan suara, modalitas sosial politik merupakan sebuah kekuatan yang mesti dimiliki para kontestan ketika hendak berlaga dalam pesta demokrasi. Modalitas sosial politik yang pertama berupa modal politik, modal politik dapat dikatakan sebagai modal dasar bagi calon legislatif dalam Pemilu legislatif. Menurut Sorensen dan Torfing modal politik mengacu pada kekuasaan individu untuk bertindak secara politis yang dihasilkan melalui partisipasi dalam proses politik yang interaktif. Sehingga seorang calon legislatif harus memiliki dukungan politik melalui partai politik agar dapat terpilih dalam pemilihan legislatif. Selain dukungan dari partai politik, modal politik berupa dukungan dari elit politik juga dapat mempengaruhi keterpilihan calon legislatif.³

² *Ibid*, hlm. 13

³ Giscka Canna Indira S dan Chusnul Mariyah, “*Analisis Modal Politik, Sosial, dan Ekonomi Terhadap Keterpilihan Caleg Perempuan Pemula Pada Pileg DPRD DKI Jakarta 2019*”, Vol. 2 *The Journalis Social and Government*, No. 2 (2021), hlm. 60

Selanjutnya berupa modal ekonomi, menurut Bourdieu modal ekonomi adalah akar dari semua jenis modal lain. Modal ekonomi merujuk pada dukungan dana atau finansial berupa uang baik berasal dari sendiri ataupun partai politik dan pihak-pihak lainnya. Dukungan ekonomi yang dibutuhkan oleh calon legislatif dalam Pemilu legislatif tidak hanya berasal dari dirinya sendiri atau sumber dana pribadi saja, namun berasal dari aktor-aktor ekonomi atau donator lainnya.⁴ Kemudian modal sosial, Robert Putnam menyatakan bahwa modal sosial adalah suatu mutual trust Antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Pendapat ini mengandung pengertian diperlukan ikatan atau jaringan sosial yang ada dalam masyarakat, dan norma yang mendorong produktivitas.⁵

Dalam pemilihan legislatif, modal politik (*political capital*), modal sosial (*social capital*) dan modal ekonomi (*economic capital*) dapat mempengaruhi seorang kontestan dalam memperoleh dukungan dari masyarakat. Semakin besar akumulasi modal yang dimiliki seorang kontestan maka semakin besar pula dukungan yang diperoleh. Hal tersebut merupakan kesempatan bagi calon legislatif untuk mendapatkan suara dari pemilih, terlebih lagi calon legislatif perempuan. Perempuan memiliki kapabilitas dan figur yang cenderung rendah. Hal tersebut menjadi keterbatasan bagi perempuan untuk mengasosiasikan

⁴ *Ibid*, hlm. 61

⁵ *Ibid*

program-program mereka. Dengan menggunakan modal politik, modal sosial dan modal ekonomi, memudahkan calon legislatif perempuan untuk mendapat suara dari masyarakat.

Pada pasal 28 D ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menjelaskan kesetaraan dalam pemenangan suara yang berbunyi “Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, dan Pasal 28 H ayat 2 Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”⁶ Dalam konteks norma ini, kaum perempuan dikonstruksikan sebagai pihak yang berhak untuk menerima “perlakuan khusus” agar mencapai persamaan dan keadilan dalam bidang politik, khususnya meningkatkan keterwakilan kaum perempuan sebagai anggota DPR. Perlakuan khusus ini merupakan konsekuensi logis hukum dari tindakan Indonesia melakukan ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan melalui UU Nomor 68 Tahun 1958 (UU Hak Politik Perempuan), ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women/CEDAW*) melalui UU Nomor 7 Tahun 1984 (UU CEDAW), dan

⁶ Tijow dan Lusiana Margareth, “Perempuan Menggugat Atas Integritas Tubuh Dirinya Tidak Terpenuhinya Janji Kawin”, Jakarta: Surya Pena Gemilang, hlm. 235-236

ratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik (*Convention on Civil and Political Rights*) melalui UU Nomor 12 Tahun 2005.⁷

Kedudukan perempuan di Indonesia secara formal cukup kuat sebab banyak ketentuan dalam berbagai undang-undang serta peraturan lain yang memberi perlindungan yuridis padanya. Selain itu, Indonesia pun telah meratifikasi dua perjanjian, yaitu perjanjian mengenai Hak Politik Perempuan (*Convention on the Political Rights of Women*) dan perjanjian mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Political Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) atau CEDAW. Indonesia telah menerima deklarasi Wina yang sangat mendukung kedudukan perempuan. Akhirnya, dalam undang-undang pemilihan umum sejak 2004 dibuka kesempatan agar perempuan dipertimbangkan menduduki 30% kursi wakil rakyat.⁸

Upaya untuk mendorong partisipasi perempuan di bidang politik dan pemerintahan cukup gencar dilakukan, misalnya penetapan kuota 30% anggota Caleg, dan penyusunan Rancangan Undang-Undang Kesetaraan Keadilan Gender (RUU KKG), namun hasil pemilu anggota legislatif 2014 belum menunjukkan angka keberhasilan yang signifikan karena baru mencapai 17,34% dari 30% keterwakilan perempuan yang semestinya duduk di bangku

⁷ *Ibid*, hlm. 723

⁸ Miriam Budiarto, "*Dasar-dasar Ilmu Politik*", edisi revisi (PT Gramedia Pusaka Utama, 2019), hlm. 258

DPR RI dan pada tahun 2019 hasil pemilu anggota legislatif perempuan hanya 20,5% dari 30%, padahal jumlah pemilih perempuan di Indonesia lebih banyak ketimbang pemilih laki-laki.⁹

Berikut data jumlah kursi dan persentase yang diperoleh perempuan DPR RI mulai tahun 1999 hingga 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut:¹⁰

Tabel 1. Daftar Data Persentase Anggota Perempuan DPR RI periode 1999-2019

Tahun Pemilu	Jumlah Anggota DPR	Anggota DPR Perempuan	Persentase (%)
1999	500	40	8,0
2004	550	62	11,2
2009	560	104	18,6
2014	560	97	17,3
2019	575	115	20,5

Sumber: Inter-Parliamentary Union

Dalam tingkatan politik lokal, keterwakilan perempuan juga mengalami catatan yang belum baik. Berikut data anggota legislatif perempuan pada tahun 2009-2014 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang membenarkan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan dalam dunia politik:¹¹

⁹ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik*, Edisi revisi 2016 (Depok: Rajawali Pers, 2016), hlm. 325

¹⁰ *Ibid*, hlm. 326.

¹¹ KPU Tanjung Jabung Barat

Tabel 2. Data Anggota Perempuan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2009-2014

NAMA ANGGOTA	PARTAI POLITIK
Yennie	PAN
Hj. Hamdiah	GOLKAR
Cici Halimah	PDIP
Yani Permani	PDIP
Megawati Sihotang	PDIP

Sumber: KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Berikut data anggota legislatif perempuan pada tahun 2014-2019 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang membenarkan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan dalam dunia politik:¹²

Tabel 3. Data Anggota Perempuan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2014-2019

NAMA ANGGOTA	PARTAI POLITIK
Ramziah	NASDEM
Nurasiah	PKB
Mariatul Kiftiah	PKS
Cici Halimah	PDIP

¹² KPU Tanjung Jabung Barat

Yennie	PAN
--------	-----

Sumber: KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Berikut data anggota legislatif perempuan pada tahun 2019-2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang membenarkan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan dalam dunia politik:¹³

Tabel 4. Data Anggota Perempuan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2019-2024

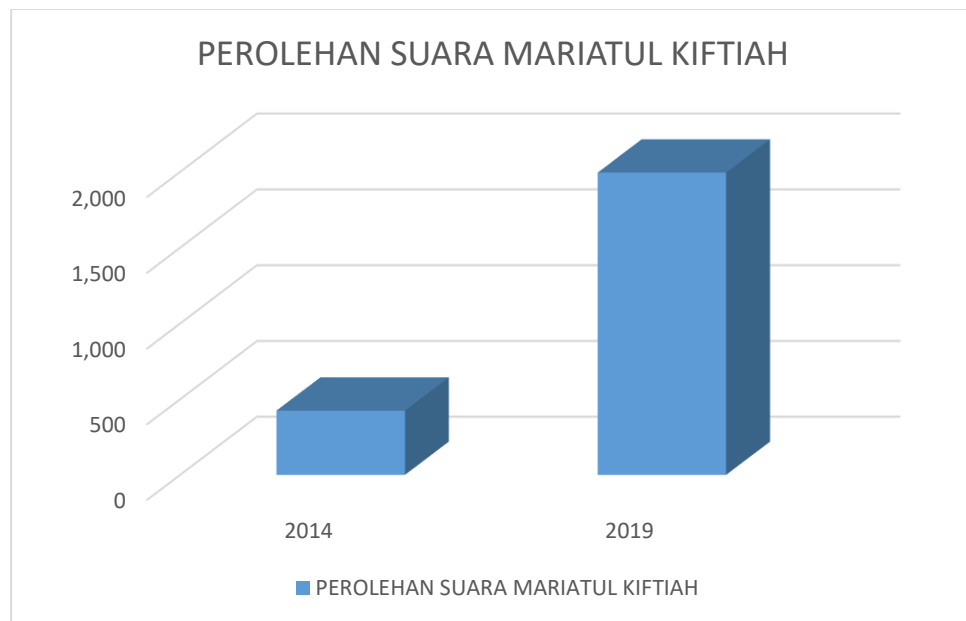
NAMA ANGGOTA	PARTAI POLITIK
Hj. Nurasiah	PKB
Hj. Cici Halimah	PDIP
Jamilah	PDIP PAW dari tahun 2021
Ns. Neli	PDIP
Mariatul Kiftiah	PKS
Bunga Fitria Ningsih	PAN PAW dari tahun 2021
Nova Anggun Sari	PAN
Wildawati	DEMOKRAT

Sumber: KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat

¹³ KPU Tanjung Jabung Barat

Dari data diatas menunjukkan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan pada bidang politik, namun pada data diatas ada salah satu anggota perempuan yang berhasil menduduki kursi DPRD dari tahun 2014 sampai saat ini, yaitu adalah Mariatul Kiftiah yang berasal dari partai PKS dapil 1 di kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berikut perolehan suara Mariatul Kiftiah pada periode 2014-2019 dan 2019-2024 pada pemilihan umum legislatif di Kabupaten Tanjung Jabung Barat:

Gambar 1. Grafik Perolehan Suara Mariatul Kiftiah



Pada grafik diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2014 Mariatul Kiftiah berhasil mendapatkan suara dari masyarakat sebanyak 425 suara, pada tahun 2019 Mariatul Kiftiah berhasil mendapatkan sebanyak 1.006 suara. Fenomena kemenangan Mariatul Kiftiah diduga kuat kemenangannya dipengaruhi oleh

beberapa modalitas yang mampu diorganisir efektif dalam kontestasi politik lokal. Karakteristik masyarakat Tanjung Jabung Barat identik dengan kentalnya mayoritas masyarakatnya yang menganut Islam Muhammadiyah atau NU, sedangkan Mariatul Kiftiah berasal dari partai PKS yang identik dengan Islam Timur Tengah. PKS dianggap identik dengan Islam Timur Tengah dikarenakan PKS terinspirasi oleh gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir.¹⁴ Maka dari itu fenomena ini dianggap menarik untuk diteliti dikarenakan masyarakat Tanjung Jabung Barat yang bermayoritaskan menganut Islam Muhammadiyah atau NU dapat memilih Mariatul Kiftiah sebagai anggota legislatif selama 2 periode yang berasal dari partai PKS yang identik dengan Islam Timur Tengah.

Pada penelitian ini peneliti mencantumkan penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian terdahulu ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Penelitian pertama yakni mengkaji skripsi Phylium Mahambarwati yang berjudul “Strategi Marketing Politik Anggota Legislatif DPRD Perempuan Dalam Memenangkan Pemilihan Legislatif Periode 2021-2024 di Kota Jambi”. Hasil penelitian menunjukkan Caleg perempuan menggunakan strategi politik yang terbagi atas strategi ofensif dan defensif. Strategi politik calon legislatif perempuan tersebut seperti: (1) Jaringan sosial, (2) Jaringan media, (3)

¹⁴ Ahsanul Khalikin, “*Ikhwanul Muslimin dan Gerakan Tarbiyah di Banten dan Kota Batam*”, Peneliti Puslitbang Kehidupan keagamaan, hlm. 62

Jaringan keagamaan, (4) Jaringan kekerabatan, (5) Pendekatan tokoh politik. Caleg perempuan juga mengalami konflik internal politik (horizontal dan vertikal) dan konflik eksternal partai politik. Konflik internal secara horizontal terjadi Antara sesama caleg (laki-laki dan perempuan) dalam satu partai politik yang sama. Konflik secara vertical terjadi Antara pengurus dengan Caleg perempuan dalam satu partai yang sama.¹⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yakni lokasi dalam penelitian sebelumnya berada di Kota Jambi, sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selain itu pada penelitian sebelumnya meneliti kepada anggota DPRD perempuan di Kota Jambi sedangkan penelitian ini akan berfokus meneliti Mariatul Kiftiah anggota DPRD perempuan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penelitian Kedua mengkaji skripsi Nendian Deva Pratama yang berjudul “Strategi Politik Pemenangan Masnah Busro-Bambang Bayu Suseno Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi politik yang dilakukan oleh tim pemenangan Masnah Busro-Bambang Bayu Suseno dalam Pilkada Kabupaten Muaro Jambi lebih mengarah kepada strategi untuk melakukan pemasaran politik, pengalaman politik dan karakteristik Masnah Busro dan BBS, strategi

¹⁵ Phylium Mahambarwati, “*Strategi Marketing Politik Anggota Legislatif DPRD Perempuan Dalam Memenangkan Pemilihan Legislatif Periode 2021-2024 di Kota Jambi*”, (2020)

melakukan kegiatan promosi melalui iklan politik, debat politik dan kampanye untuk mempublikasikan Masnah Busro dan BBS, strategi dalam memasarkan harga atau citra positif yang dimiliki Masnah Busro dan BBS dan strategi dalam memasarkan tempat kegiatan kampanye Masnah Busro dan BBS. Masing-masing strategi tersebut dilakukan menggunakan pendekatan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan gotong royong. Aspek pendukung yang dimiliki oleh Masnah Busro-Bambang Bayu Suseno dalam Pilkada Kabupaten Muaro Jambi meliputi aspek internal yaitu *figure* keluarga Masnah Busro terutama ayah Masnah yang menjadi orang yang paling disegani di Kecamatan Kumpeh Ulu dan pengalaman politik yang dimiliki Masnah Busro dan BBS yang sama-sama pernah menjabat sebagai anggota DPRD. Selanjutnya aspek eksternal meliputi tim pemenangan yang solid dan belum adanya pemimpin wanita di Kabupaten Muaro Jambi.¹⁶ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yakni lokasi dalam penelitian sebelumnya berada di Kabupaten Muaro Jambi, sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selain itu pada penelitian sebelumnya penelitian ditujukan untuk meneliti strategi kemenangan Masnah Busro dan BBS, sedangkan pada penelitian ini ditujukan untuk meneliti modalitas kemenangan Mariatul Kiftiah.

¹⁶ Nendian Deva Pratama, "*Strategi Politik Pemenangan Masnah Busro-Bambang Bayu Suseno Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Muaro Jambi*", (2022)

Penelitian ketiga mengkaji skripsi Fufutri Elisa yang berjudul “Peranan Elit Tradisional *Tigo Luhah Tanah Sekudung* Dalam Kemenangan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kerinci Tahun 2018”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemenangan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kerinci tidak lepas dari adanya faktor yang mempengaruhi yaitu faktor internal, eksternal, perilaku pemilih, pengelolaan media, pengawalan suara yang berlapis. Kemudian yang tidak kalah penting bagi kemenangan Bupati Kabupaten Kerinci faktor yang mempengaruhi pemilih pada Pilkada Tahun 2018 di Kabupaten Kerinci dilatar belakangi oleh sosial budaya karena ikatan persaudaraan dan ikatan adat yang masih sangat kental. Orang adat atau elit tradisional mempunyai kedudukan strategis didalam masyarakat adat tigo luhah tanah sekudung, tidak dipungkiri bahwa setiap kandidat yang dekat dan melibatkan elit tradisional dapat meningkatkan reputasi mereka. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya elit tradisional tigo luhah tanah sekudung memiliki peranan penting dalam menentukan hasil Pilkada meskipun secara langsung partisipatif dan pasif.¹⁷ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yakni lokasi dalam penelitian sebelumnya berada di Kabupaten Kerinci, sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selain itu penelitian sebelumnya meneliti tentang peranan elit dalam proses pemenangan Bupati dan Wakil Bupati, sedangkan

¹⁷ Fufutri Elisa, “*Peranan Elit Tradisional Tigo Luhah Tanah Sekudung Dalam Kemenangan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kerinci Tahun 2018*”, (2022)

dalam penelitian ini meneliti tentang modalitas kemenangan Mariatul Kiftiah dalam pemilihan umum legislatif.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas maka penulis merumuskan permasalahan yaitu::

1. Apa saja bentuk modalitas yang digunakan Mariatul Kiftiah untuk mendapatkan suara dari masyarakat dalam pemilihan umum legislatif selama 2 periode di Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
2. Apa faktor yang mempengaruhi munculnya modalitas yang digunakan Mariatul Kiftiah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana disebutkan di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui modalitas yang digunakan Mariatul Kiftiah untuk mendapatkan suara dari masyarakat dalam pemilihan umum legislatif selama 2 periode di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi munculnya modalitas yang digunakan Mariatul Kiftiah

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini berupa:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan informasi dan sumbangan pikiran khususnya untuk akademisi, mahasiswa, serta masyarakat dalam mengembangkan tulisan terkait Modalitas Kemenangan Mariatul Kiftiah pada Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Tanjung Barat di Era Reformasi

2. Manfaat Praktis

Sebagai informasi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian lanjutan dalam bidang yang sama.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Modal Politik

Modal politik dapat dikatakan sebagai salah satu bekal kandidat untuk dapat memenangkan suatu kontestasi politik. Seorang kandidat yang memiliki modal politik lebih besar dibandingkan kandidat lain, tentu mempunyai peluang yang lebih besar juga untuk dapat memenangkan kontestasi politik. Modal politik dapat diartikan

bagaimana kandidat mendapatkan pengaruh atau dukungan yang diberikan oleh lembaga politik.¹⁸

Casey sebagaimana dikutip Sudirman Nasir mendefenisikan modal politik sebagai pendayagunaan keseluruhan jenis modal yang dimiliki seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik untuk menghasilkan tindakan politik. Casey lebih lanjut memerinci adanya empat pasar politik yang berpengaruh pada besaran modal politik yang dimiliki oleh seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik.¹⁹

Pasar politik pertama adalah pemilu, karena pemilu adalah instrument dasar untuk pemilihan pemimpin dalam sistem demokrasi. Pasar politik kedua adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Pasar politik ketiga adalah dinamika hubungan dan konflik antara pelaku politik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Pasar politik keempat adalah pendapat atau pandangan umum mengenai pelaku politik atau lembaga politik itu.²⁰

Sementara itu modal simbolik dalam hubungannya dengan dinamika politik bisa dipahami sebagai besaran legitimasi, reputasi, dan tingkat

¹⁸ Joni Firmansyah dan Shafira Faradhila, “*Modal Politik Kandidat Perempuan Dalam Pemilihan Umum Studi Kasus Dewi Noviany dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa 2020*” Vol. 6, No. 1 (2021), hlm. 94

¹⁹ Tawakkal Baharuddin, “*Modalitas Dalam Pemilukada Bupati Perempuan Pertama di Sulawesi Selatan*”, Penerbit Gre Publishing, 2017, hlm. 40

²⁰ *Ibid*

penghormatan (respect) yang diperoleh oleh pelaku-pelaku politik ataupun lembaga-lembaga politik akibat tindakan-tindakan politik yang dilakukan atau tidak dilakukannya. Selain adanya dukungan dari lembaga politik untuk mendapatkan suatu modal politik, segenap individu juga membutuhkan dukungan dari masyarakat dan elit-elit tertentu, dalam konteks lokal dapat disebutkan sebagai elit lokal.²¹ Nurhasim dalam Joni Firmansyah menyebutkan bahwa elit politik lokal adalah mereka yang memiliki jabatan politik tinggi di tingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik. Elit politiknya seperti Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD, Anggota DPRD, maupun pemimpin-pemimpin partai yang ada di tingkat daerah. Elit Non-Politik Lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elit non politik ini seperti elit keagamaan, elit organisasi masyarakat, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya.

1.5.2 Modal Ekonomi

Modal ekonomi atau dana politik yang tidak sedikit dalam Pemilu sangat dibutuhkan oleh setiap kandidat dalam mempersiapkan dan menghadapi kontestasi, karena berkaitan dengan pembiayaan yang besar untuk melakukan suatu program atau biaya lainnya dalam masa

²¹ *Ibid*

kampanye. Modal ekonomi sendiri tidak hanya berupa uang tetapi bisa berupa barang atau jasa.

Modal ekonomi memiliki makna penting dalam pelaksanaan kampanye yakni sebagai mesin politik. Pada saat musim kampanye kandidat akan membutuhkan uang yang besar untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti mencetak poster, spanduk, dan berbagai kebutuhan lainnya.

Modal ekonomi lebih ditekankan pada modal finansial berupa uang dan modal material lainnya. Menurut Sahdan dan Habodin dalam Joni Firmansyah, setiap penyelenggaraan pemilihan umum, baik pemilu kepala daerah (PILKADA) maupun pemilu legislatif (PILEG) membutuhkan “dana politik” untuk biaya kegiatan pilkada. Istilah dana politik dapat dibedakan dengan melihat sumber dan penggunaan, yaitu (1) dilihat dari sumbernya, dana politik berasal dari sumbangan pasangan calon dan sumbangan dari para simpatisan (donatur) baik secara perseorangan maupun perusahaan. Dana politik juga bisa diartikan sebagai wujud konkrit dari partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap pasangan calon kepala daerah. (2) Dari sisi pengguna, dana politik dibedakan berdasarkan bentuk peruntukan pengeluarannya menjadi pengeluaran untuk membiayai aktivitas rutin partai politik dan pengeluaran kampanye. Dalam konteks pilkada

penggunaan dana politik dilakukan oleh calon pasangan tidak hanya untuk pengeluaran kampanye dalam bentuk mencetak brosur, konvoi, biaya transportasi, biaya konsumsi, cetak kaos, poster dan iklan. Tetapi juga mengenai pengeluaran pasangan calon untuk bayar partai politik yang akan dijadikan kendaraan politik, dan membeli suara masyarakat.²²

1.5.3 Modal sosial

Modal sosial dapat berupa sumber daya yang digunakan untuk memperkuat interaksi sosial antar lapisan masyarakat. Modal sosial berupa hubungan sosial baik itu dengan teman, kolega, atau orang tertentu yang memiliki pengaruh untuk keterpilihan kandidat perempuan. Selain itu modal sosial juga dapat diartikan sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakkan kebersamaan, memobilisasi ide, rasa saling percaya dan saling menguntungkan, sehingga tercapai tujuan dan dapat mencapai kemajuan bersama.

Modal sosial diyakini memiliki peran yang signifikan antara lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, memperkuat posisi tawar politik, mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi bencana dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

²² Joni Firmansyah dan Shafira Faradhila, Op. Cit, hlm 93

Pembahasan tentang modal sosial lazimnya terkait dengan mendayagunakan sumber daya (resources) dalam rangka memperoleh keuntungan ekonomi (economic gain) atau manfaat sosial (social benefit) melalui kegiatan produktif. Sumber daya tersebut bukan berupa barang, uang, kepandaian atau keterampilan tetapi berupa relasi-relasi sosial.

Putnam menggunakan konsep modal sosial untuk lebih banyak menerangkan perbedaan-perbedaan dalam keterlibatan yang dilakukan warga. Putnam menyatakan bahwa modal sosial melekat dalam relasi-relasi sosial. Modal sosial dibangun melalui jejaring sosial. Adapun komponen-komponen yang terdapat dalam modal sosial tersebut menurut Putnam mencakup: (1) *trust* (kepercayaan) atau nilai-nilai positif yang menghargai perkembangan atau prestasi, (2) norma sosial dan obligasi, serta (3) jejaring sosial yang menjadi wadah kegiatan sosial, terutama dalam bentuk asosiasi-asosiasi sukarela (*voluntary associations*).²³

Putnam percaya bahwa asosiasi sukarela memiliki peran penting dalam upaya mengembangkan modal sosial. Asosiasi sukarela bukan hanya efektif menyalurkan informasi (*flow of information*), tetapi juga

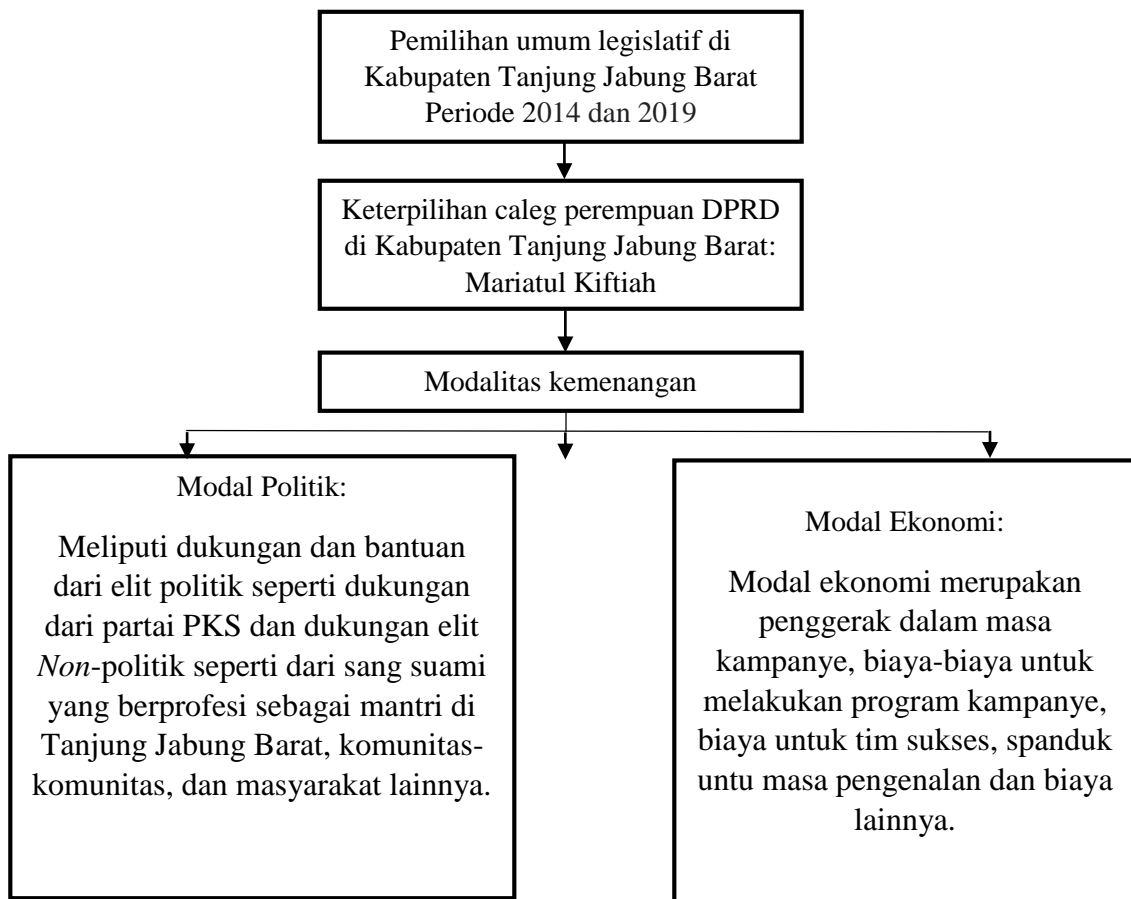
²³ Suntoyo Usman, "Modal Sosial", Pustaka Pelajar 2018, hlm. 30

menjadi ajang berinteraksi dan melakukan transaksi di antara aktor-aktor yang terhimpun di dalamnya.²⁴

1.6 Kerangka Pikir

Untuk mempermudah penulis dalam rangka menyusun juga menjelaskan maksud dan tujuan penelitian ini, maka diperlukan suatu kerangka pikir yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Berikut ini kerangka pikir pada penelitian ini:

Gambar 2. Modalitas Kemenangan Mariatul Kiftiah pada Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Era Reformasi



Pada pemilihan umum legislatif periode 2014 dan 2019 terdapat Caleg perempuan yang terpilih dalam 2 periode tersebut yaitu Mariatul Kiftiah. Kemenangan Mariatul Kiftiah didasari oleh modalitas yang ia miliki yaitu, modal politik, modal ekonomi, dan modal sosial.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁵ Cara ilmiah yang dimaksud adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan dasar keilmuan. Dasar keilmuan yang dimaksud adalah rasional, empiris dan sistematis.

Rasional berarti kegiatan penelitian ini dilakukan dengan cara-cara yang dilakukan itu dapat dijangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.²⁶

Penelitian ini menggunakan metode penelitian metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif penulis anggap tepat untuk mencari data guna menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat. Penulis beranggapan melalui metode penelitian kualitatif, akan membawa penulis mengetahui fenomena secara lebih kompleks, mendalam dan juga menyeluruh yang pada akhirnya

²⁵ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*", Bandung Alfabeta, 2013, hlm. 2

²⁶ *Ibid*

didapatkan suatu penjelasan yang rinci dari suatu permasalahan yang diteliti, terkait dengan modalitas kemenangan Mariatul Kiftiah pada pemilihan umum legislatif di kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.²⁷ Makanya, data dan fakta temuan dilapangan dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka-angka.

Mendesripsikan sesuatu berarti menggambarkan apa, mengapa dan bagaimana suatu kejadian terjadi. Dalam menuangkan suatu tulisan, laporan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan dari data/fakta yang diungkap di lapangan untuk memberikan ilustrasi utuh dan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan.²⁸

²⁷ Hardani, “*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*”, Edisi 1, (Penerbit Pustaka Ilmu: 2020), hlm. 54

²⁸ Dajma’an Satori dan Aan Komariah, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Alfabeta Bandung 2009, hlm. 28

1.7.2 Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kecamatan Tungkal Ilir. Penulis memilih daerah tersebut dikarenakan daerah tersebut merupakan daerah pemilihan Mariatul Kiftiah. Pemilihan lokasi penelitian ini penulis anggap akan dapat mempermudah pengumpulan data untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi problematika dalam modalitas kemenangan politik Mariatul Kiftiah pada pemilihan umum legislatif di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada era reformasi.

1.7.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan, maka penelitian ini berfokus pada aspek penelitian Mariatul Kiftiah pada pemilihan umum legislatif di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.7.4 Sumber Data

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh penulis dari sumber asli atau data yang langsung diberikan kepada pengumpul data.²⁹ Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian yang diperoleh secara langsung dari

²⁹ Sugiyono, Op. Cit, hlm. 225

sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian. Singkatnya, data primer adalah keseluruhan data hasil penelitian yang didapatkan dari lapangan.

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.³⁰ Data sekunder dapat dikatakan data yang diperoleh peneliti melalui sumber perantara dan diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain berupa literatur berupa buku, skripsi, jurnal dan data pendukung yang diperoleh penulis dari sumber informasi kemudian dikumpulkan selama proses penelitian.

1.7.4 Teknik Penentuan Informan

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling* (Sampel Bertujuan). Teknik *Purposive Sampling* merupakan teknik pemilihan sumber data dengan tujuan tertentu. Teknik penentuan informan ini menggunakan pertimbangan pribadi yang sesuai dengan topik penelitian, peneliti memilih subjek atau objek sebagai unit analisis. Peneliti memilih unit analisis tersebut berdasarkan kebutuhannya dan menganggap bahwa unit analisis tersebut representatif³¹. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*. Hlm 48.

Tabel 5. Kriteria informan dalam penelitian

NO.	KRITERIA
1.	Orang yang memiliki informasi terkait keterpilihan Mariatul Kiftiah pada Pemilu 2014 dan 2019
2.	Orang yang berdomisili di Tanjung Jabung Barat
3.	Orang yang memiliki kemampuan untuk menceritakan atau memberikan informasi keterpilihan Mariatul Kiftiah pada pemilu 2014 dan 2019
4.	Orang yang terlibat dalam interaksi dengan Maritul Kiftiah dalam masa kampanye maupun dalam masa jabatan 2014
5.	Orang yang terlibat dalam interkasi dengan Mariatul Kiftiah dalam masa kampanye 2019
6.	Orang yang rela dan bersedia memberikan informasi kepada peneliti
7.	Orang yang dengan sadar dan tidak di bawah tekanan untuk memberikan informasi kepada peneliti
8.	Informan merupakan orang yang cocok untuk diwawancarai mengenai modalitas Mariatul Kiftiah pada Pemilu di Tanjung Jabung Barat

Berdasarkan kriteria di atas, peneliti menetapkan beberapa informan penelitian sebagai berikut :

Tabel 6. Data informan penelitian

NO.	NAMA INFORMAN	JABATAN
1.	Mariatul Kiftiah	Anggota legislatif Tanjung Jabung Barat 2014 dan 2019

2.	M. Andika, S.sos.	Pengamat politik Tanjung Jabung Barat
3.	Budiono	Pengurus organisasi masyarakat Muhammadiyah Tanjung Jabung Barat
4.	Drs. M. Habi Zainal. MUD	Pengurus organisasi masyarakat NU Tanjung Jabung Barat
5.	Achmad Syafei, S.Kom	Kepala Lurah Tungkal III di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
6.	Imron	Sekretaris umum partai PKS Tanjung Jabung Barat
7.	Ropi	Masyarakat Tanjung Jabung Barat
8.	Dedi	Masyarakat Tanjung Jabung Barat Dapil 1 Mariatul Kiftiah
9.	Peni Senepi, S.Sos	Ketua KNPI Tanjung Jabung Barat
10.	Drs. H.Navarin Karim, M.SI.	Pengamat Politik Tanjung Jabung Barat

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah

mendapatkan data.³² Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan adalah wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi. Wawancara mendalam penulis pilih karena dalam pelaksanaannya lebih bebas untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, pihak yang menjadi subjek atau objek yang diajak wawancara oleh penulis dapat diminta pendapat, pengamatan, dan penjelasan secara mendalam mengenai masalah yang akan diteliti.

Langkah selanjutnya yang digunakan penulis adalah teknik pengumpulan data dokumentasi. Dokumentasi bisa berupa foto, arsip-arsip disinggung mendukung penelitian, seperti dokumen pribadi, bisa berupa catatan tindakan serta pengalaman dan dokumen resmi. “Metode dokumentasi ini pada intinya digunakan untuk menelusuri data histori”.³³ Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Melalui dokumentasi, diharapkan dapat membantu menjawab rumusan masalah mengenai marketing politik Nurasiah pada pemilihan umum legislatif.

³² Sugiyono, Op. Cit, hlm. 224

³³ Burhan Mungin, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2012), hlm. 125

1.7.6 Teknik Analisis Data

Mengutip Sugiyono (2013), “Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh”.³⁴ Dengan pengamatan yang terus menerus mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Untuk itu perlu adanya sebuah teknik untuk menganalisis data tersebut. Pada penelitian ini penulis menggunakan tiga teknik analisis data yakni reduksi data, penyajian data dan konklusi atau penarikan kesimpulan.

Reduksi data, “data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu diperlukan dicatat secara teliti dan rinci”.³⁵ Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksikan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencarinya bila diperlukan.

Penyajian data, Setelah proses data di reduksi, maka langkah berikutnya adalah menyajikan data. Data temuan dilapangan dianalisis dan disajikan dalam bentuk uraian singkat atau teks naratif, bagan,

³⁴ Sugiyono, Op. Cit, hlm. 243

³⁵ *Ibid*, hlm 243

flowchart, gambar dan sebagainya. Langkah terakhir dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan atau **konklusi**.

1.7.7 Keabsahan Data

Dalam penelitian, keabsahan data juga sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya. Keabsahan data adalah suatu konsep yang mengacu pada sejauh mana data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian dapat dipercaya dan relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, terdapat dua triangulasi data diantaranya :

1. Triangulasi sumber: Triangulasi sumber adalah teknik untuk menguji kredibilitas data, teknik ini dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber.³⁶
2. Triangulasi teknik: Triangulasi teknik adalah teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek pada sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda.³⁷

³⁶ Sugiyono, Op. Cit, hlm. 274

³⁷ *Ibid*

